



Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh
 Salam sejahtera bagi kita semua
 Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Bantul yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023. Penyampaian RLPPD ini merupakan perwujudan dari kewajiban kami sebagai Bupati Bantul kepada masyarakat Kabupaten Bantul serta merupakan tanggung jawab pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dan selama tahun 2023, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan lancar.

GAMBARAN UMUM DAERAH

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

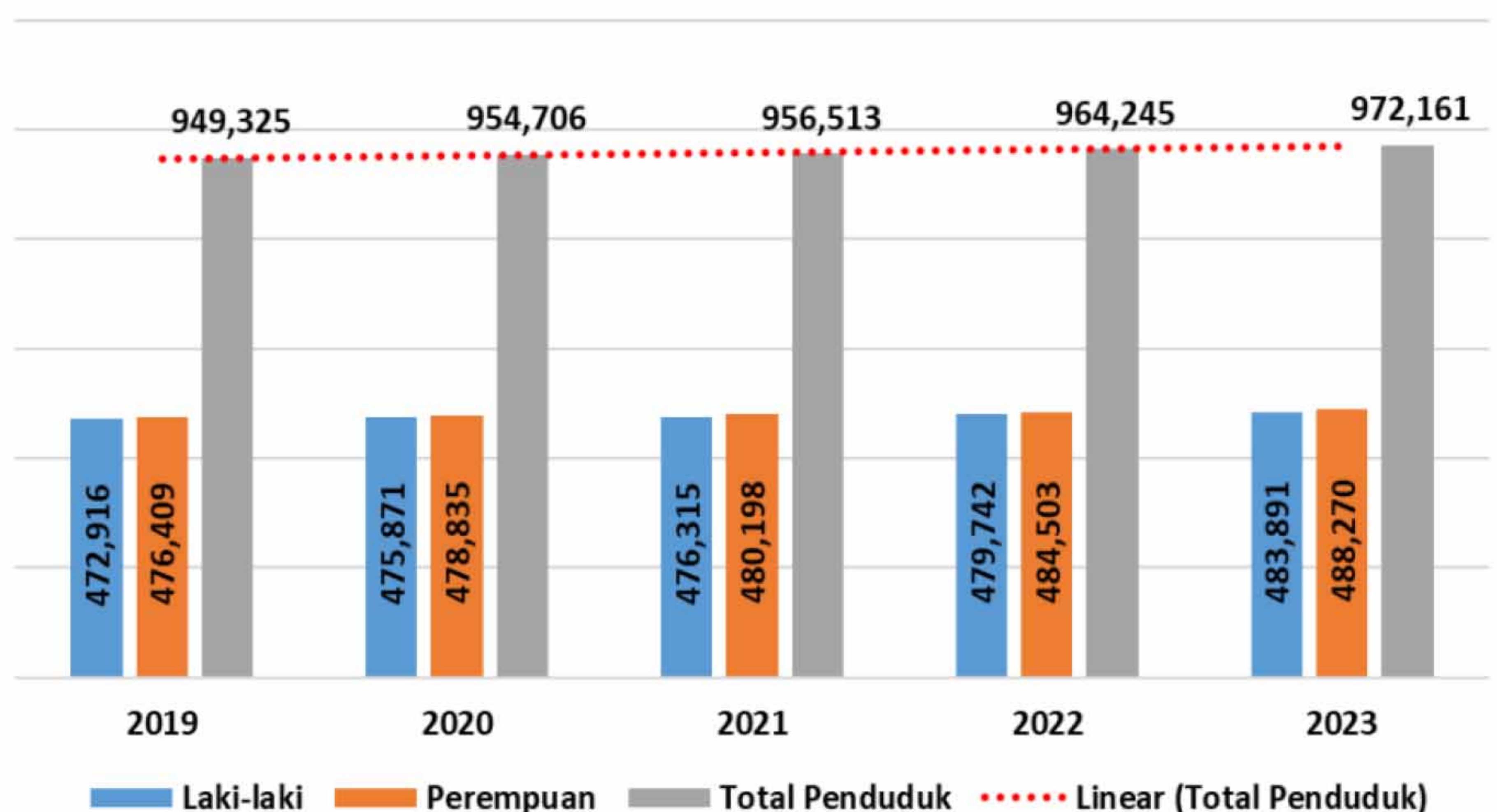
MISI

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Luas wilayah: 506,85 km² (15,91% dari luas DIY), terbagi atas 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan
1	Srandakan	2
2	Sanden	4
3	Kretek	5
4	Pundong	3
5	Bambanglipuro	3
6	Pandak	4
7	Bantul	5
8	Jetis	4
9	Imogiri	8
10	Dlingo	6
11	Pleret	5
12	Piyungan	3
13	Banguntapan	8
14	Sewon	4
15	Kasih	4
16	Pajangan	3
17	Sedayu	4

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul (2024), diolah



I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh Kabupaten Bantul pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,69	81,74	1,301
2	Angka Kemiskinan	12,27	11,96	-2,526
3	Angka Pengangguran	3,97	3,78	-4,786
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,19	5,06	-2,505
5	Pendapatan per Kapita	31.157.663,869	33.693.856,929	8,14
6	Ketimpangan Pendapatan	0,41	0,454	10,732

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Bantul (2024)

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

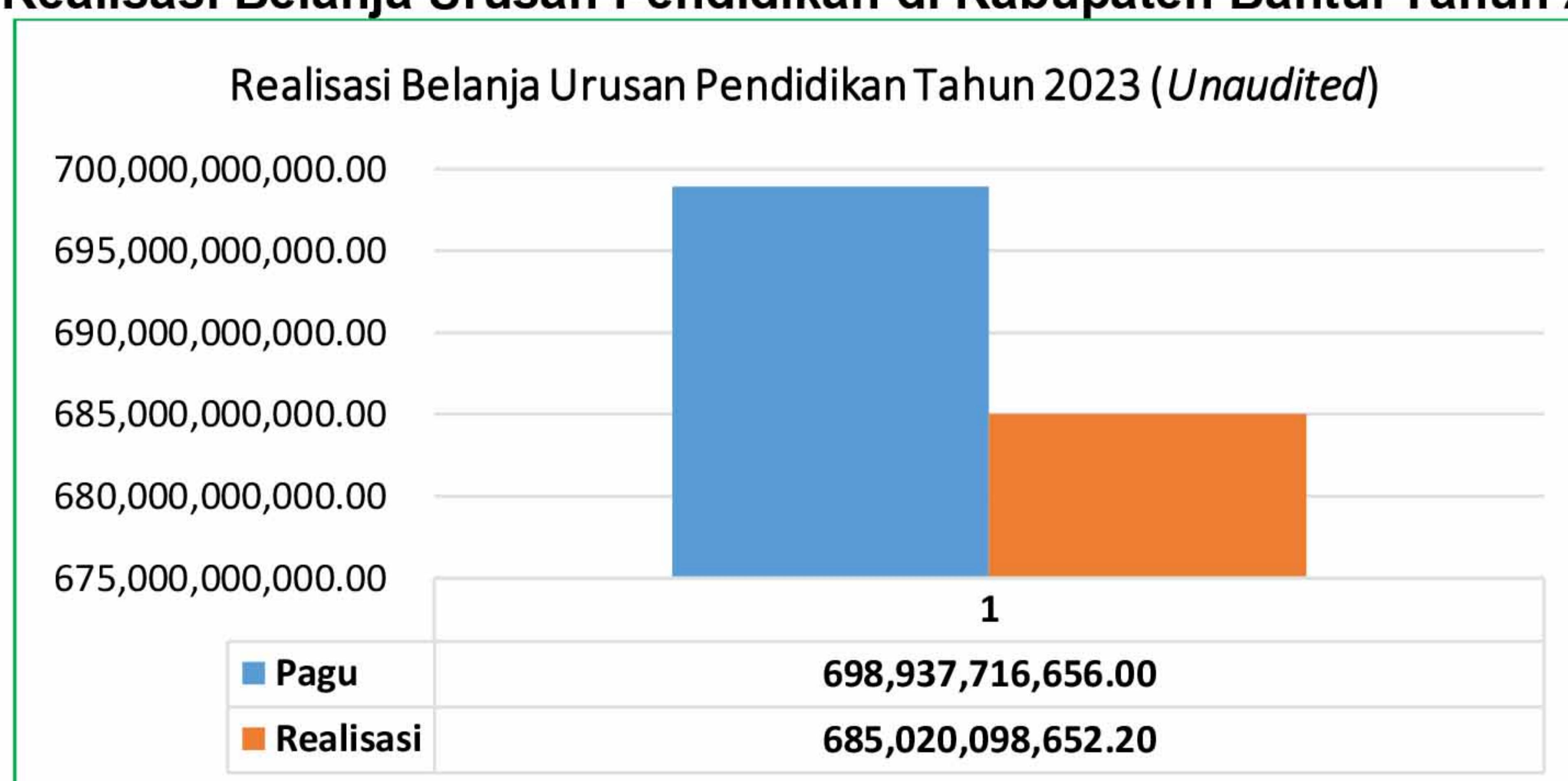
1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	104,93%	100,05%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,18%	103,75%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,155%	100,25%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,508%	99,835%

Sumber: Dinas DIKPORA Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Persen Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2023

98,01%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

C. Permasalahan Urusan Pendidikan yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belum optimalnya koordinasi data secara terpadu dan komprehensif dengan wilayah administrasi lain (antar Kabupaten/Kota/Provinsi) tentang data warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah administrasi lain.



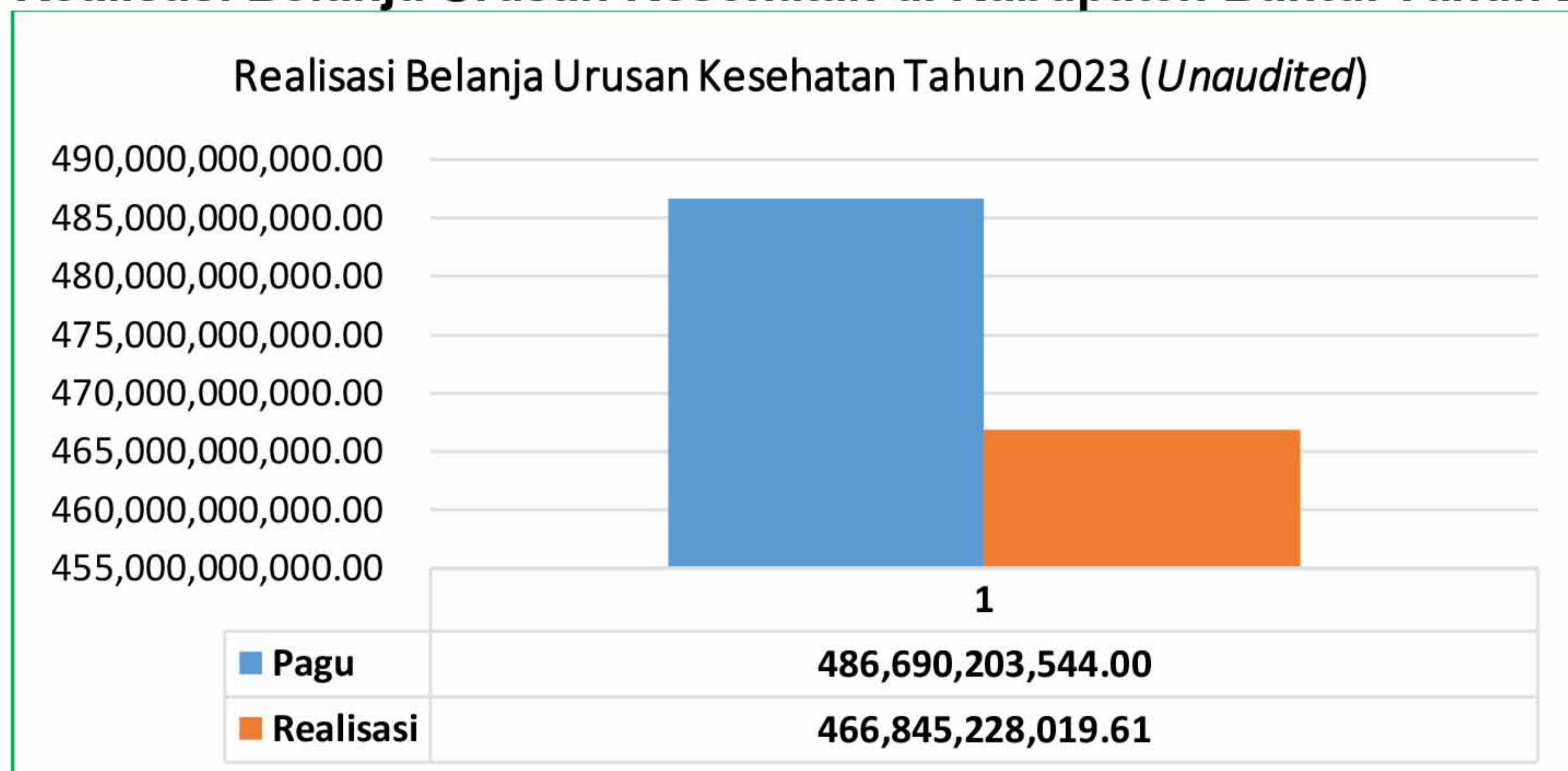
2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,401	1,474
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	92,308%	100,000%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,512%	96,751%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,917%	99,934%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	83,018%	83,754%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,078%	88,608%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,451%	99,913%
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44,040%	85,144%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	53,527%	74,670%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11,249%	59,150%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,228%	79,704%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	84,195%	90,515%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,509%	100,000%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,000%	100,000%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

C. Permasalahan Urusan Kesehatan yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belum optimalnya koordinasi data secara terpadu dan komprehensif dengan wilayah administrasi lain (antar Kabupaten/Kota/Provinsi) serta dengan fasilitas kesehatan swasta tentang data warga Kabupaten Bantul yang telah terlayani sebagai pasien di fasilitas kesehatan di wilayah administrasi lain atau swasta.



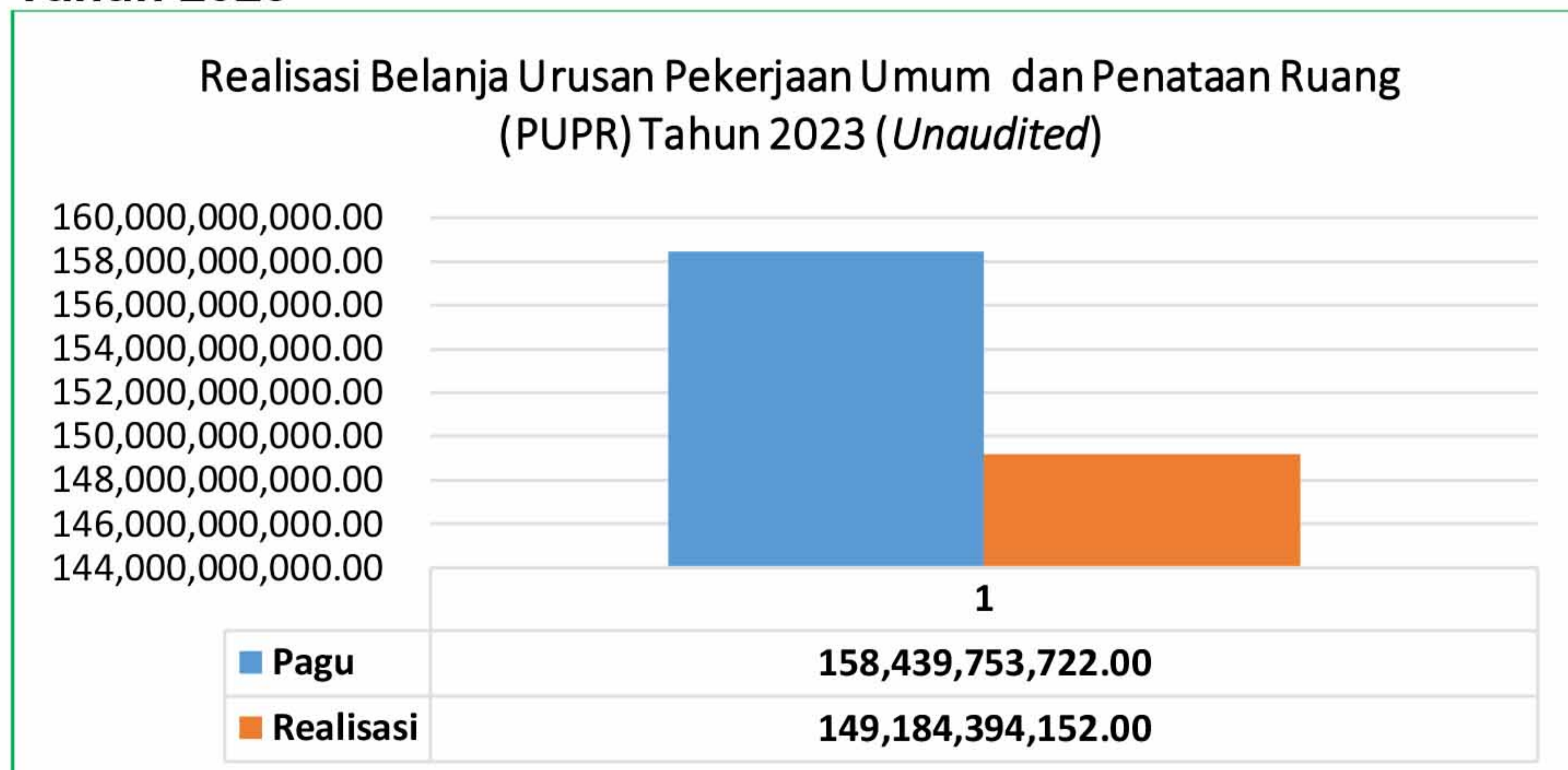
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,459%	80,658%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100,000%	100,000%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,000%	100,000%
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100,000%	100,000%
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	75,835%	64,670%
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	84,983%	99,611%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,000%	100,000%

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

C. Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belum semua ruas jalan di Kabupaten Bantul dalam kondisi mantap. Terdapat penambahan ruas jalan dan panjang jalan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, sehingga mempengaruhi perhitungan tingkat kemantapan jalan Kabupaten.



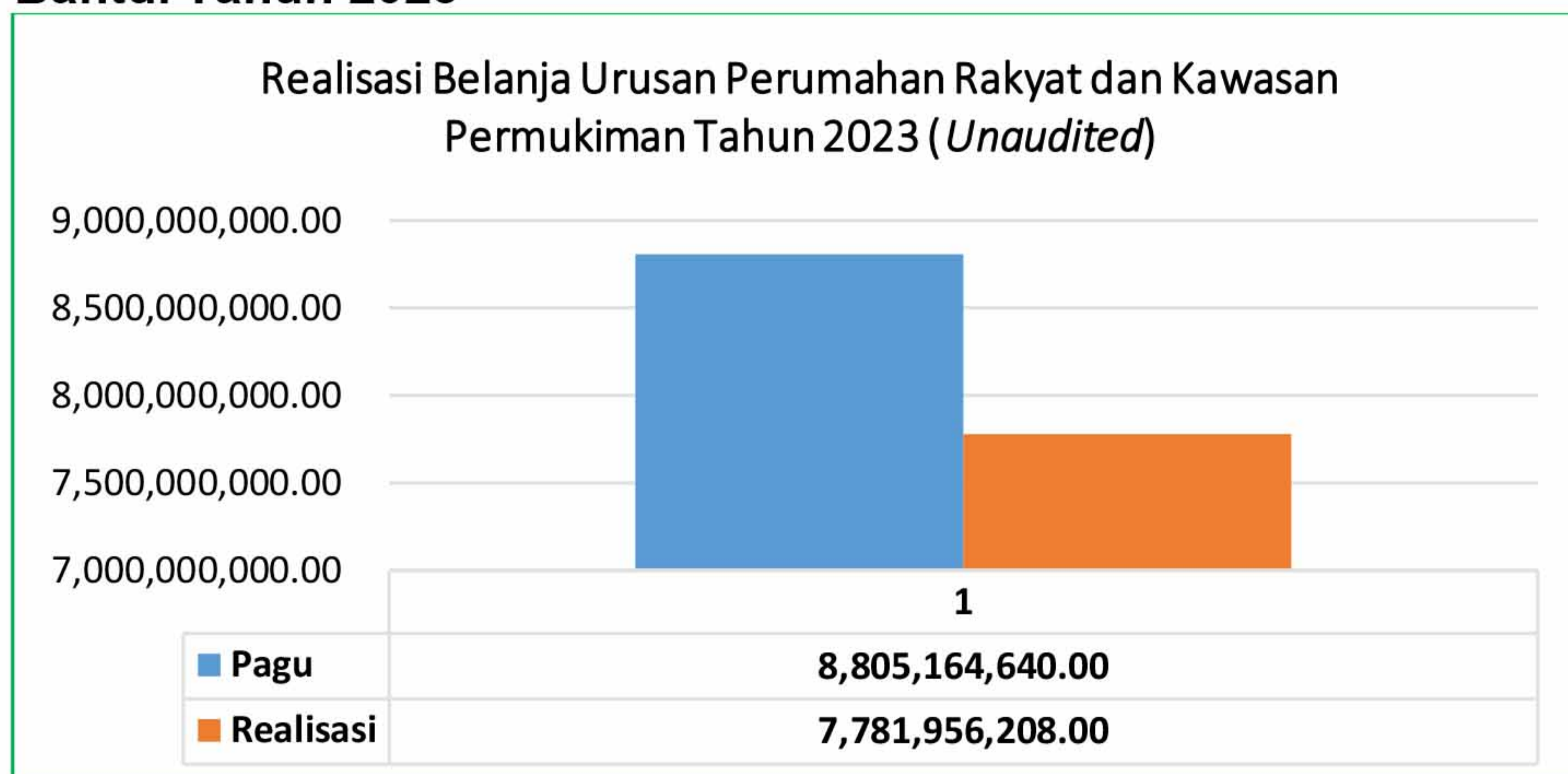
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2023

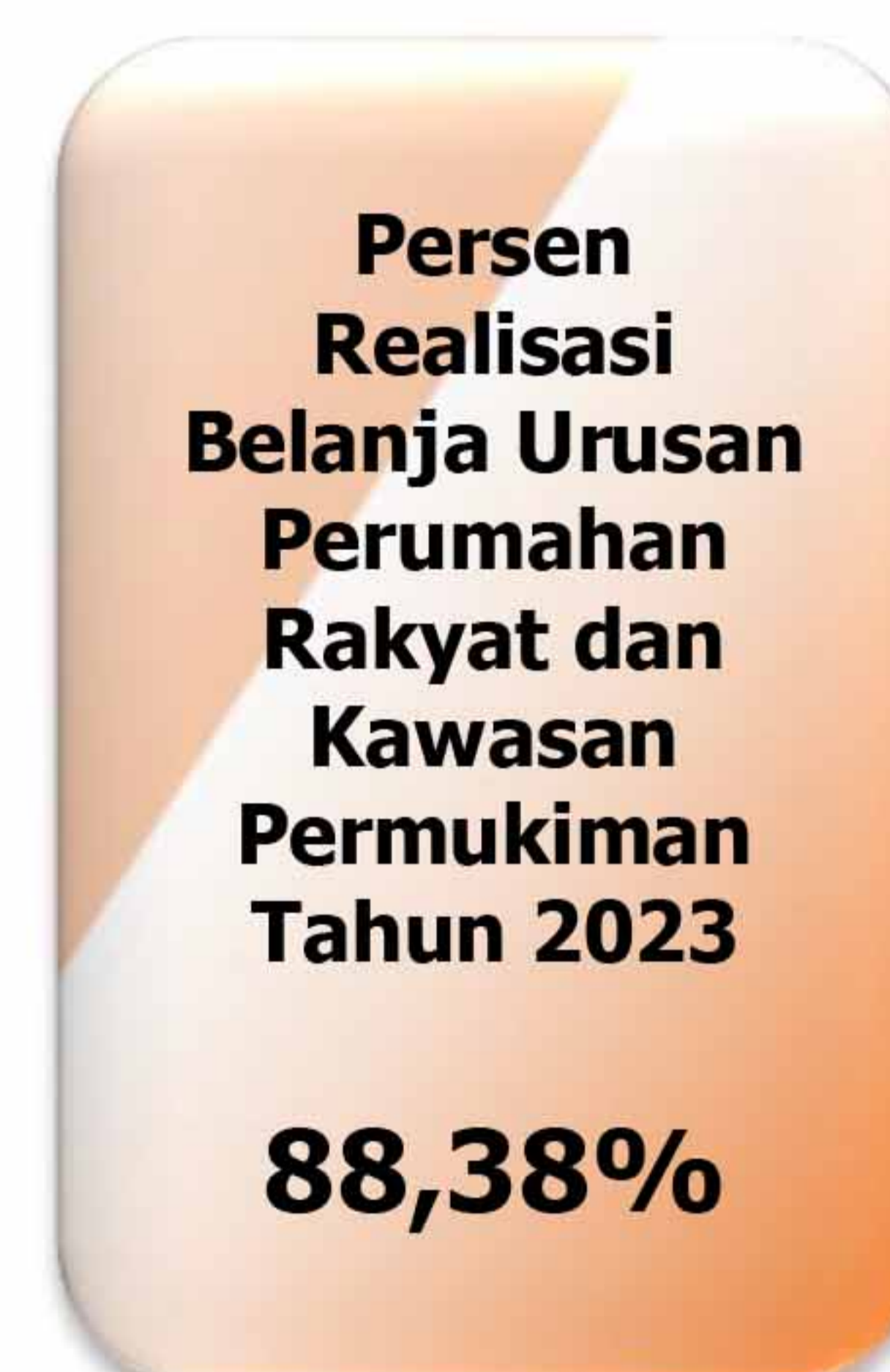
No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Tidak terjadi bencana	Tidak terjadi bencana
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak terjadi relokasi akibat program pemerintah	Tidak terjadi relokasi akibat program pemerintah
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	37,556%	46,206%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,733%	0,909%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	13,021%	7,042%

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024



C. Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Dihadapi di Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belum terselesaikannya penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bantul (dalam proses).

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

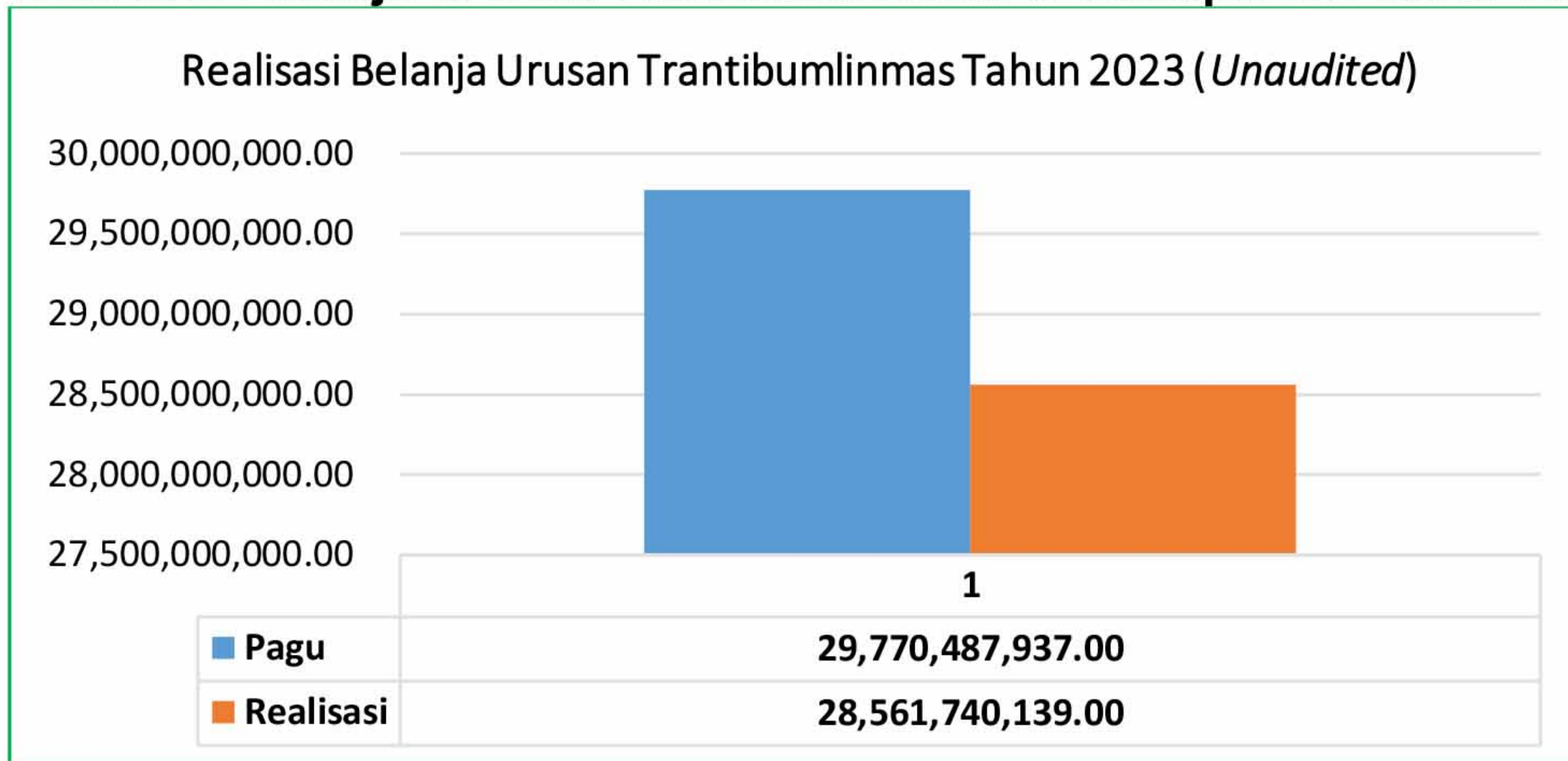
A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,000%	100,000%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	76,000%	100,000%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,000%	100,000%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,000%	100,000%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,000%	100,000%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,000%	100,000%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,20 menit	8,19 menit

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2024), BPBD Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>



B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Persen Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

95,94%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

C. Permasalahan Urusan Trantibumlinmas yang Dihadapi Kabupaten Bantul Tahun 2023

Belum optimalnya pendataan warga negara penerima layanan Trantibumlinmas karena terbatasnya akses data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100,000%	100,000%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,000%	100,000%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2023



Persen Realisasi Belanja Urusan Sosial Tahun 2023

98,96%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

C. Permasalahan Urusan Sosial yang Dihadapi Kabupaten Bantul Tahun 2023

Rincian komponen biaya alat bantu spesifik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 belum dapat dihitung secara optimal. Kebutuhan alat bantu untuk difabel tidak dapat dianggarkan di awal perencanaan secara spesifik karena kebutuhan alat bantu untuk difabel dengan spesifikasi rinci dan tertentu, harus diukur terlebih dahulu (antara lain alat bantu pendengaran, alat bantu mata, dan alat bantu kaki palsu). Ketersediaan alat bantu yang dapat direncanakan dalam penganggaran berupa alat bantu yang bersifat universal (kursi roda, tongkat putih, dan kruk).



III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan **skor kinerja 3,1958** dan **status kinerja Sedang**.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Menurut opini BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022, Nomor 11A/LHP/XVIII.YOG/042023, tanggal 10 April 2023, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pagu anggaran pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar Rp 2.322.852.031.554,00, realisasi sebesar Rp 2.416.051.708.354,57 atau mencapai 104,01% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



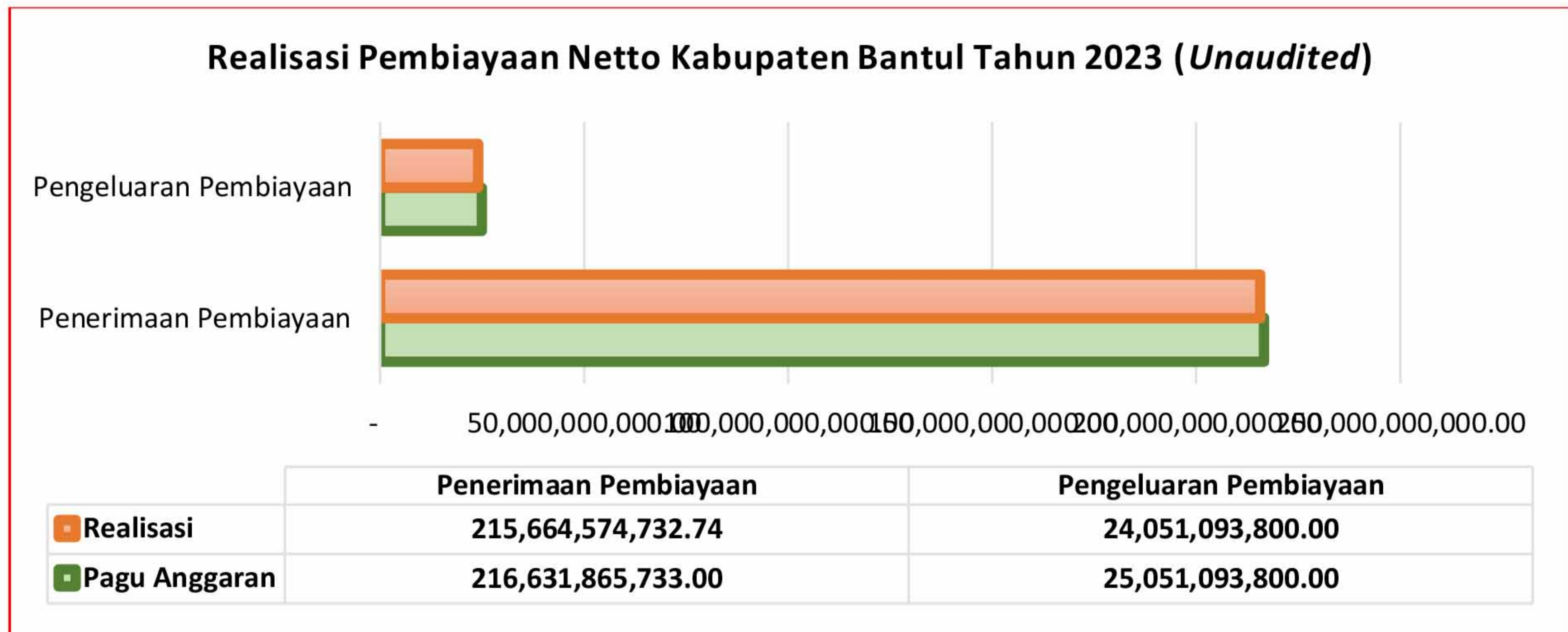
Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data *unaudited*, data cut off 19 Januari 2024

Pagu anggaran belanja Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebesar Rp 2.514.432.803.487,00, realisasi sebesar Rp 2.411.425.977.527,72 atau mencapai 95,90% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

Pagu anggaran pembiayaan netto Kabupaten Bantul Tahun 2023 (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) sebesar Rp 191.580.771.933,00, realisasi sebesar Rp 191.613.480.932,74 atau mencapai 100,02% (*unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

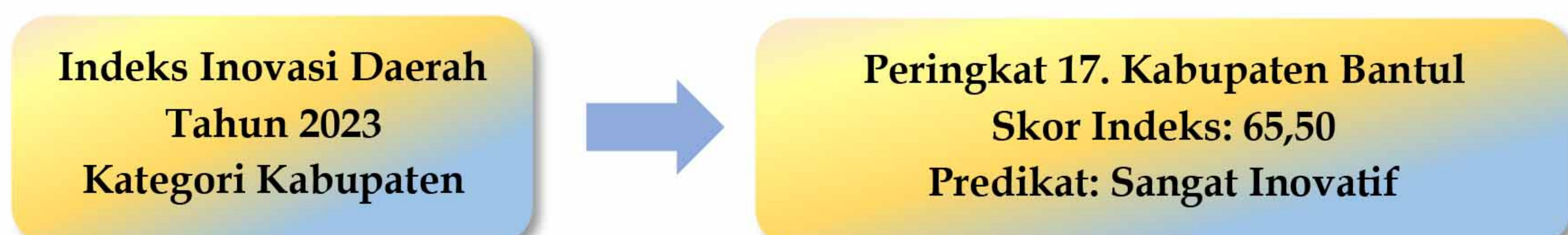


Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, data unaudited, data cut off 19 Januari 2024

V. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kalurahan, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal. Berdasarkan data inovasi daerah yang bersumber dari BAPPEDA Kabupaten Bantul, terdapat **247 inovasi daerah** yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah serta Kalurahan, dan masih berjalan pada Tahun 2023. Data inovasi daerah tersebut dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/InovasiBantul2023>.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 menetapkan bahwa Kabupaten Bantul memperoleh Skor Indeks dan Predikat sebagai berikut:





Inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul) yaitu Gelimasjiwo (Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo) menuju SIMANTAP SEJAGAT (Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat) berhasil menjadi pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2023* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). SIMANTAP SEJAGAT merupakan transformasi dari Gelimasjiwo yang dimanfaatkan untuk penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang lebih tertata, sistematis, dan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.



Penghargaan *Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI)* Tahun 2023 dari Kementerian PANRB kepada Pemerintah Kabupaten Bantul atas Inovasi Gelimasjiwo Menuju SIMANTAP SEJAGAT

Demikian RLPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi/pusat/instansi vertikal, atas dukungan dan partisipasi, serta kinerjanya sehingga dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul.

Kami menerima saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang lebih baik. Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Bantul, 22 Maret 2024

BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH